

INFORMASI DAN DOKUMEN YANG DIKECUALIKAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	OPD
1	Nomor KK (Kartu Keluarga)	UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dinas Dukcapil
2	NIK (Nomor Induk Kependudukan)	UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat 1	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dinas Dukcapil
3	Tanggal/ Bulan/tahun lahir	UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dinas Dukcapil
4	Keterangan tentang Kecacatan Fisik dan/atau Mental;	UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dinas Dukcapil
5	NIK IbuKandung	UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dinas Dukcapil
6	NIK Ayah	UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dinas Dukcapil
7	beberapa isi catatan Peristiwa Penting	UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dinas Dukcapil
8	Akte Pencatatan Sipil	1, UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang no. 23 tahun 2006 pasal 77 2, Perpres no. 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pasal 62	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi warga yang bersifat rahasia	Dinas Dukcapil
9	Data Kependudukan	Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tatacara Pemberian hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Tidak Terbatas	Kebocoran Data Kependudukan	Terlindunginya Data Kependudukan WNI Seluruh Indonesia	Dinas Dukcapil

10	Lokasi server	1. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU no 23 Tahun 2006 (Pasal 1) 2. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU no 23 Tahun 2006 (Pasal 7)	Tidak Terbatas	Tindak Pengrusakan/Pencurian Data	Melindungi /mengamankan perangkat Jarkomdat dan Database SIAK	Dinas Dukcapil
11	Kode Akses dan User / Password	1. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU no 23 Tahun 2006 (Pasal 1) 2. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU no 23 Tahun 2006 (Pasal 5 dan Pasal 7)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan Hak Akses oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Database	Dinas Dukcapil
12	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU no 23 Tahun 2006 (Pasal 1 Point 21) 2. Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang dan Pencatatan Sipil	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga keamanan jaringan	Dinas Dukcapil
13	Dokumen / berkas / arsip ASN	1, UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 2, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Kepegawaian	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dinas Dukcapil
14	Daftar nilai SKP ASN	1, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 2, PP No. 5 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja ASN	2 Tahun	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dinas Dukcapil
15	Daftar kekayaan, keuangan, aset dan pendapatan / rekening Bank ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat pribadi	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dinas Dukcapil
16	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat pribadi	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dinas Dukcapil
17	Identitas ASN yang mengajukan izin perceraian / perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat pribadi	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dinas Dukcapil
18	Data rekam medis pasien (ASN) dan atau riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbatas	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat pribadi	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dinas Dukcapil

19	HPS (harga perkiraan sendiri)	1, UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf l dan huruf j 2, Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya 3, Perpres 54 tahun 2010	Selama Proses pengadaan barang / jasa	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara sistem (informasi apabila menimbulkan penilaian tidak objektif)	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran yang wajar	Dinas Dukcapil
20	Dokumen penawaran kontrak	1, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Kip pasal 17 huruf l dan huruf j 2, Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Selama Pproses pengadaan barang / jasa Tidak Terbatas	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Dinas Dukcapil
21	SPJ / alat bukti pertanggung jawaban keuangan akan tetapi yang dapat dibuka adalah laporan hasil pemeriksaan BPK yang diserahkan ke legislatif	1, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2, UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN Ta 2014 3, PP No. 70 Tahun 2012 tentang standar biaya Tahun 2013	Tidak Terbatas	Dikhawatirkan adanya pemanfaatan / penyalahgunaan informasi oleh pihak tidak bertanggung jawab dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum	Menjaga informasi mengenai SPJ / alat bukti pertanggung jawaban keuangan pada DPPA pada kecamatan	Dinas Dukcapil
22	Dokumen kontrak	1, UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf l dan huruf j 2, PP No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya (akan ditambahkan)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan dokumen oleh pihak lain	Menjaga kerahasiaan dokumen	Dinas Dukcapil
23	Dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa	Perpres 54 Tahun 2010	Tidak Terbatas	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga kerahasiaan dokumen	Dinas Dukcapil